LAPORAN EVALUASI INTERNAL

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BELU

TRIWULAN II

TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode TW II yaitu pada bulan April sampai dengan Juni 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data Capaian Kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun Triwulan II 2025 sebesar 101,07% dengan predikat “Istimewa”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Triwulan II Tahun 2025.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target TW2	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	100%	121,95	Istimewa
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa

		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%	0%	0	-
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	56%	56%	42,86%	76,54	Butuh Perbaikan
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	66,67%	83,34	Baik
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	93,25%	112,5%	120,64	Istimewa

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,12%	84,12%	99,83%	118,68	Istimewa
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE dmasing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81,12	80,5%	99,24	Baik
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40%	40%	45%	112,50	Istimewa

4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	37,5%	75	Butuh Perbaikan
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	-	0	0	tidak ada target di TW II
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	-	0	0	tidak ada target di TW II
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	30%	30%	50%	166,67	Istimewa
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	55%	55%	50%	90,91	Baik
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	40%	40%	95%	237,50	Istimewa

Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 Indikator kinerja dengan capaian “istimewa”, 3 indikator dengan capaian “baik”, 2 indikator dengan capaian “butuh perbaikan”, 2 indikator yang tidak ada realisasi karena tidak ada target di TW II, dan 1 indikator yang di *exclude* perhitungan karena diluar kendali kita (target tetap ada tiap TW untuk mengakomodir jika terjadi KLB) yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan

yang diuji sesuai standar oleh UPT .

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “istimewa” yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “baik” yaitu:

- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja UPT
- Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “Butuh perbaikan” yaitu:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sasaran utama indikator kinerja utama ini adalah meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase sediaan farmasi beresiko berupa obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Untuk IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW II sebesar 82% dengan persentase capaian sebesar 121,95% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel sediaan farmasi pada TW II adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	**Mei**	**Juni**
1.	Obat	1	3	3
2.	Obat Bahan Alam	0	1	1
3.	Kosmetik	0	9	1
4.	Suplemen Kesehatan	0	1	1
5.	Kuasi	0	0	0
	Total	**1**	**14**	**6**

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.

3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel pangan olahan berisiko dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Untuk IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100 % dari target TW II sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel pangan olahan pada TW II adalah sebanyak 11 sampel dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	Mei	Juni
1.	Pangan olahan	5	1	5

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Adanya relaksasi anggaran sehingga sampel pangan yang di TW I tidak tersampling dapat di sampling di TW II.
3. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
4. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah

mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Untuk IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 0% (dari target TW II sebesar 100%) karena tidak terdapat sampel KLB pada TW II.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini jika terdapat sampel KLB adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel harus diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling artinya adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Untuk IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW II sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel PIRT pada TW II adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		April	Mei	Juni
1.	Pangan industri rumah tangga	2	0	0

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Adanya relaksasi anggaran sehingga sampel PIRT yang di TW I tidak tersampling dapat di sampling di TW II.
3. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
4. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

5. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholde**r

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dalam hal ini pelaku usaha dan lintas sektor . Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di TW 2 sebesar 42,86 % dari target sebesar 56% dengan persentase capaian sebesar 76,54% kriteria “Butuh Perbaikan” diperoleh hasil perhitungan sesuai dengan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rinciannya adalah sebagai sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

TW 2	Jumlah surat tindak lanjut			Jumlah CAPA		
	Obat	**Pangan**	**Kos**	**Obat**	**Pangan**	**Kos**
April	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Mei	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Juni	**4**	**4**	**0**	**2**	**0**	**0**
Status	**MK : 0** **TMK : 10**	**MK : 4** **TMK : 7**	**MK : 3** **TMK : 1**			

Dari total jumlah sarana yang diperiksa, terdapat 18 sarana TMK. Selanjutnya, sarana TMK ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dari total 18 tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Belu, 6 sarana telah menindaklanjuti berupa penyampaian CAPA.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja IKU ini adalah:
  Pelaku usaha lambat/tidak merespon surat tindak lanjut yang diberikan oleh UPT selain itu Kurangnya pemahaman pembuatan CAPA dari pelaku usaha serta masih banyak sarana obat masih ditemukan temuan berulang
- Hal yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirim surat tindak lanjut ke sarana dan melakukan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perbaikan atas temuan.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan

dengan izin edar MD maupun izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan SOP yang terkait.

Untuk IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 2 sebesar 66,67 % dari target sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 83,34% kriteria “Baik”.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas pemeriksa langsung menyampaikan temuan saat diperiksa, sehingga adanya respon untuk perbaikan dari pemilik sarana.
2. Dilakukan pendampingan perbaikan baik secara online (via whatsapp dan zoom) maupun offline kepada pelaku usaha.
3. Petugas pemeriksa terus mengupdate perkembangan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik sarana.

Untuk TW II tidak ada jadwal untuk pemeriksaan sarana produksi (PIRT dan MD).

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan; sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Untuk IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW II diperoleh hasil 112,5% dari target sebesar 93,25% dengan persentase capaian sebesar 120,64% kriteria “Istimewa’.

TW II	**Jumlah PS**				**Jumlah TL**			
	Obat	**OBA**	**SK**	**KOS**	**Obat**	**OBA**	**SK**	**KOS**
April	3	0	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**
Mei	3	0	**1**	**1**	**3**	**0**	**0**	**1**
Juni	4	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**

Dari total hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, ditemukan MK= 4 dan TMK =. 11 Selanjutnya sarana yang TMK seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas berkomitmen melakukan pengawasan sarana sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan sarana terkait temuan berulang agar dapat diperbaiki sesuai ketentuan

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan yang meliputi beberapa tahap diantaranya dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut serta SOP terkait.

Untuk IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 2 sebesar 100% dari target sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Istimewa”.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah: petugas pemeriksa sudah displin dalam membuat dan mengirimkan tindak lanjut kepada sarana dan melakukan komunikasi dengan pemilik sarana terkait temuan atau kendala yang dihadapi.

Adapun jumlah sarana distribusi yang diperiksa pada TW II sebagai berikut :

No.	Indikator	Jumlah yang diperiksa	MK	TMK
1.	Sarana Distribusi Pangan olahan	11 sarana	7 sarana	4 sarana

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah sediaan farmasi dan pangan olahan yang dievaluasi berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = u(A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Untuk IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di TW II diperoleh hasil 99,83% dari target sebesar 84,12% dengan persentase capaian sebesar 118,68% kriteria “Istimewa’.

No.	Jenis komoditi Iklan	Target	Realisasi
1.	Iklan Obat	6	6
2.	Iklan kosmetik	35	35
3.	Iklan OBA	6	6
4.	Iklan Suplemen kesehatan	3	3
5.	Iklan kuasi	3	3
6,	Iklan pangan	22	22

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

Petugas pemeriksa sudah melakukan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan telah dilakukan evaluasi hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

10. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas kualitas dan sebaran (kuantitas) melalui pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM.

Indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 indikator :

a) Tingkat pemahaman terhadap sumber informasi KIE
b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
c) Tingkat pemahaman terhadap manfaat program KIE
d) Tingkat minat terhadap informasi KIE

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 80,5% dengan target 81,12% dan persentase capaian sebesar 99,24 % dengan kriteria “Baik”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Loka POM di Kab. Belu akan melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada TW berikutnya sesuai dengan target.

11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kerja utama yang menentukan data analisis kejahatan terdiri dari:

1. Analisis penelusuran siber

   Petugas Loka POM di Kabupaten Belu melakukan kegiatan penelusuran siber untuk mencegah terjadinya penyebaran produk obat dan makanan secara daring di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan

   Fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Belu untuk memetakan kejahatan obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja UPT. kejahatan peredaran obat dan makanan secara daring banyak tersebar karena Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, sehingga banyak adanya peredaran produk-produk dari negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa izin edar.

   Pelaksanaan cegah tangkal di UPT terdiri dari :

a. laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Adapun Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan pada TW II Sesuai Standar Loka POM Belu sebesar 37,5% dari target sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 75% kriteriai “Butuh Perbaikan”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pemantauan dan pelaporan dari patroli siber telah dilakukan setiap bulan
2. Untuk kegiatan profiling di Loka POM belu belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.

12. **Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

A. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:
   UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

C. Kriteria UMKM yang didampingi Untuk UMK Pangan Olahan :
   1. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
   2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

UMKM yang didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Belu pada 2025 adalah UMKM pangan olahan dengan target sebanyak satu UMKM memperoleh izin CPPOB. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan meliputi :

1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan,
2. Penetapan target UMK Pangan Olahan,
3. Bimtek CPPOB,
4. Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan,
5. Penerbitan IP CPPOB, serta
6. Monev dan pelaporan.

Untuk IKU Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di TW 2 sebesar 45% dari target sebesar 40% dengan persentase capaian sebesar 112,50% kriteria “Istimewa”.

Dari keenam tahap tersebut, hingga triwulan kedua tahun 2025 sudah terlaksana tiga tahap sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1.	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	14 Maret 2025	7 pelaku usaha
2.	Penetapan UMK pangan olahan target	21 Maret 2025	menetapkan 4 pelaku usaha untuk didampingi
3.	Bimtek CPPOB	14-16 Mei 2025	bimbingan teknis dilaksanakan secara daring diikuti oleh 2 pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bimbingan

			teknis. narasumber bimbingan teknis dari BBPOM Kupang.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pendampingan UMKM oleh petugas Loka POM di Kabupaten Belu dilaksanakan secara intens.
2. Komunikasi yang intens antara petugas dan pelaku usaha terkait kendala dalam proses pemenuhan IP-CPPOB melalui media online atau offline.
3. Pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai saran dari petugas.

13. Indeks Pelayanan Publik UPT

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu belum menangani pengaduan dan permintaan informasi dari pelanggan.
2. Loka POM di Kab. Belu akan tetap menerapkan standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan pada TW berikutnya 3,67 dengan kriteria B = **Baik.**

14. Indeks manajemen risiko BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Nilai capaian IKU manajemen resiko BPOM pada TW II adalah 0 dari target TW II adalah 0 dengan predikat sangat kurang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Penilaian indeks manajemen resiko pada Loka POM di Kab. Belu akan dinilai pada TW 4 (akhir tahun). Dan untuk data dukung untuk daftar resiko dan aktivitas pengendalian resiko akan dikumpulkan pada TW II dan TW IV.

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu.

Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada TW II sebesar 50% dengan target 30% dan persentase capaian sebesar 166,67 % dengan kriteria ”Istimewa”.

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Tersusunnya beberapa SOP
2. Tersusunnya beberapa dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu
3. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai, seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama setiap Senin.

16. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kinerja instansi berdampak pada layanan publik.

Untuk loka POM di Kab Belu untuk target data dukungnya yaitu dokumen Perencanaan Kinerja yang diselesaikan, dokumen Pengukuran Kinerja yang diselesaikan, dan dokumen Pelaporan Kinerja yang diselesaikan.

Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT/Unit Organisasi sesuai standar =

(Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar / Jumlah dokumen SAKIP yang disusun) x 100%

Untuk parameter persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar pada pada TW II sebesar 50% dengan target 55% dan persentase capaian sebesar 90,91% dengan kriteria ”Baik”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) : Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}\ x\ 100\%$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) dengan rumus berikut

$$\mathbf{TE} = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1. Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1. Untuk IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 95% (efisien) dari target TW II sebesar 40% dan persentase capaian sebesar 237,50 % dengan kriteria ”Istimewa”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait penanggungjawab masing-masing kegiatan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.
4. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan).

Atambua, 18 Juli 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

Ferdian Dwi Armanto, S.Farm, Apt